



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
AROSUKA

**RENJA
INSTANSI PEMERINTAH**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa atas Limpahan dan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2023.

Renja ini kami susun sebagai ujud Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan didasarkan pada Indikator Kinerja SKPD yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan untuk itu kami memerlukan Kritikan dan saran guna penyempurnaan Renja ini, namun demikian kami berharap semoga Renja ini bermamfaat sebagai bahan evaluasi dan penentuann kebijakan lebih lanjut.

Arosuka, Pebruari 2022



ELAFKI S.Pd.MM

NIP.196911122000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistimatiak Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Petrangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Riview terhadap rancangan awal RKPD	22
2.5 Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	32.
3.2 Tujuan dan Sararan Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Daerah Tahun 2006–2025 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Operasional RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renja merupakan pedoman perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah yang merupakan breakdown dari Renstra perangkat daerah selama lima tahun. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2023 mengacu pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2023, RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKPN) dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 263 ayat (4) disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Penyusunan dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2023 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok.

Penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam melaksanakan kegiatan terhadap capaian program dan hasil kegiatan serta pagu anggaran dalam tahapan di tahun 2023 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2023 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023 dengan dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2023.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok yang dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis Laporan evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar s.d Triwulan IV Tahun 2021 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok berupa :

1. Relisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 pada tabel T.C 29 sbb:

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Kegiatan Output	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Tenstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	05										
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	9.381.731.130	8.480.289.826	9.381.731.130	8.480.289.826	91	10.585.663.308	1.461.402.762	
1	05	01									
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran	4.748.469.180	4.299.115.067	4.748.469.180	4.299.115.067	91	4.448.107.358	790.248.542	
1	05	01									
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.312.000	79.244.500	79.312.000	79.244.500	100%	69.275.000	227.764.000	14%
1	05	01	06								
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.312.000	79.244.500	79.312.000	79.244.500	100%	69.275.000	227.764.000	14%
1	05	01	2								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	4.217.761.528	3.780.029.078	4.217.761.528	3.780.029.078	1	3.751.968.546	11.312.026.702	75,31%
1	5	01	2								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4.217.761.528	3.780.029.078	4.217.761.528	3.780.029.078	90%	3.751.968.546	11.312.026.702	75,31%
1	05	01	2								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya	33.000.000	32.670.000	-	-	-	-		

1	05	01	2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	33.000.000	32.670.000	0	0	0	0	32.670.000	100%
1	05	01	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan kinerja perangkat daerah	146.638.500	139.280.310	146.638.500	139.280.310	96,00	194.269.500	60.658.700	
1	05	01	2			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran	4.482.500	4.480.000	4.482.500	4.480.000	100%	1.456.000	-	100%
1	05	01	2			Penyediaan Bahan Logistik kantor	Persentase Administrasi Perkantoran	35.967.000	35.916.750	35.967.000	35.916.750	99,86%	37.369.500	7.847.000	0
1	05	01	2			Penyediaan Barang dan pengadaan	Persentase Administrasi Perkantoran	18.184.500	18.184.500	18.184.500	18.184.500	100%	17.643.000	-	-
1	05	01	2			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran	88.004.500	75.518.810	88.004.500	75.518.810	85,81%	137.801.000	52.811.700	1
1	05	01	2			Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10.250.000	9.900.000				30.950.000	-	
1	05	01	2			Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran	10.250.000	9.900.000	0	0	0	30.950.000	-	-
1	05	01	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	53.938.152	32.159.929	53.938.152	32.159.929	86	53.979.312	9.137.577	0
1	05	01	2			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100%	1.560.000	5.160.000	3
1	05	01	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Persentase Administrasi Perkantoran	50.338.152	28.559.929	50.338.152	28.559.929	56,74%	50.619.312	3.527.577	0
1	05	01	2			penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase Administrasi Perkantoran	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	450.000	100%
1	05	01	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	240.599.000	225.831.250	240.599.000	225.831.250	98	292.095.000	15.255.800	
1	05	01	2			Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapa	Persentase Administrasi Perkantoran	222.650.000	207.972.250	222.650.000	207.972.250	93,41%	283.900.000	15.255.800	0

1	05	01	2		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran	5.739.000	5.739.000	5.739.000	5.739.000	100%	8.195.000	-	-
1	05	01	2		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran	12.210.000	12.120.000	12.210.000	12.120.000	99,26%	-	-	-
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	2.440.339.450	2.183.329.834	2.440.339.450	2.183.329.834	96		304.428.720	0
1	05	02	2	01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pelanggaran trantibum yang ditangani	2.440.339.450	2.183.329.834	2.444.339.540	2.183.329.834	96	3.377.416.550	304.428.720	
1	05	02	2		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan.	2.372.288.500	2.115.748.334	2.372.288.500	2.115.748.334	90,71%	2.394.502.600	259.418.470	0
1	05	02	2	01	Penindakan atas gangguan ketenteraman ketertiban umum berdasarkan Perda dan Petkada melalui penertibandan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	-	-	-	-	0,00%	3.541.900	9.542.500	#DIV/0!
1	05	02	2	02	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	-	-	-	-		70.334.500	5.272.400	#DIV/0!
1	05	02	2	03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman danb ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil yang memuat Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.	25.613.500	25.296.250	25.613.500	25.296.250	98,76%	33.799.450	84.391.950	60%

1	05	02	2	04		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0	68.389.000	68.389.000	68,89%
1	05	02	2	05		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	42.437.540	42.285.250	42.437.450	42.285.250	100	155.850.000	-	-
1	05	02	2	06		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum	0	0	0	0	0	619.122.000	21.357.600	#DIV/0!
1	05	04				PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.192.922.500	2.051.665.665	2.192.922.500	2.051.665.665	92	2.565.728.200	366.725.500	0
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	2.166.482.500	2.026.566.665	2.166.482.500	2.026.566.665	92	2.286.438.200	357.910.500	0
1	05	04	2	01	01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan pencegahan kebakaran	-	-	2.372.288.500	2.115.748.334	93,87%	24.631.600	-	#DIV/0!
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket Pemadam Kebakaran	2.166.482.500	2.026.566.665	2.166.482.500	2.026.566.665	93,87%	2.236.244.100	354.310.500	0
1	05	04	2	01	03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen piket hasil pelaksanaan evaluasi korban kebakaran dan Non kebakaran	-	-	-	-	-	15.162.500	3.600.000	

1	05	04	2	01	04	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penganan kebakaran yang disebabkan (B3) dalam daerah kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	10.400.000	-	
1	05	04	2	02		Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	Jumlah dokumen data yang memuat Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	0	-	-	-	-	21.150.000	5.365.000	
1	05	04	2	02	01	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan /gedung yang memiliki sarana dan prasara proteksi kebakaran	-	-				10.675.000	3.750.000	
						Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan /gedung yang memenuhi kelaikan standar sarana dan prasarana kebakaran	-	-	-	-		14.475.000	1.615.000	
						Investigasi kejadian kebakaran	Tersedianya dokumen penyebab terjadinya kebakaran						37.050.000	3.450.000	
						Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah dokumen hasil Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	-	-	-	-		37.050.000	3.450.000	
1	05	04	2			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya dokumen relawan pemadam kebakaran	26.440.000	25.099.000	26.440.000	25.099.000	91	221.090.000	-	
1	05	04	2			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	26.440.000	25.099.000	26.440.000	25.099.000	91	221.090.000	-	

Dari tabel diatas capaian kinerja program/kegiatan Satpol PP dan Damkar tahun 2021 sebagai berikut ;

1. capaian kinerja Program/kegiatan yang realisasinya sesuai rencana kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.381.731.130,- dengan capaian kinerja 97,56%, yang terurai dalam 3 Program , 10 kegiatan dan 19 Sub kegiatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sesuai dengan target kinerja dan pencapaian kinerja Rencana Trategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tahun 2021 sebagai berikut:
 - Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Damkar dengan melakukan Pembinaan, pelatihan dan pembinaan
 - Melakukan sosialisasi Perda Trantibum kepada masyarakat
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
 - Meningkatkan Patroli terhadap daerah daerah yang dianggap rawan gangguan trantibum.

Sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pencapaian kinerja Rencana Srategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok tahun 2021-2026 maka secara umum berkinerja dengan baik.

3. Meskipun pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar sesuai dengan target namun masih ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :
 - Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan jabatan dan beban tugas yang akan dikerjakan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan.
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
 - Masih kurangnya pelatihan dan pendidikan Dasar bagi aparaturn Satpol PP dan Damka
4. Kebijakan /tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut:
 - Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan mutu SDM.
 - Untuk sarana dan prasarana penunjang telah diusulkan melalui APBD pengadaan Sarana dan prasarana dimaksud.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 memiliki tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dan Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi

Sasaran dari tujuan tersebut terdiri atas :

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya Ketahanan msyarakat terhadap bahaya kebakaran
3. Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2021-2026.

Berikut table kinerja utama dan formulasi Pengukuran beserta kriteria indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi cara pengukuran	Sumber data	Keterangan
1.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai rata-rata unsur pelayanan	Satpol PP dan Damkar	Pengukuran IKM dilakukan melalui hasil survei 9 kriteria SKM oleh pihak internal
		Persentase penegakan Perda	%	Jumlah laporan pelanggaran yang diselesaikan x 100% Jumlah laporan pelanggaran	Satpol PP dan Damkar	Penyelesaian Pelanggaran Perda melalui cara Penertiban dan Pembinaan serta Pembongkaran.
		Persentase Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat	%	Jumlah Linmas yang ada X 100% Jumlah target Linmas	Satpol PP dan Damkar	Kriterianya adalah jumlah linmas yang ada/aktif yang

						sesuai dengan surat keputusan Bupati
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran dalam Kabupaten/Kota	%	Jumlah Pos Pelayanan X 100% Jumlah penanganan kebakaran dalam WMK	Satpol PP dan Damkar	Kriterianya adalah Pos Pemadam yang ada sekarang
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	%	Jumlah layanan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu Tanggap oleh pemadam kebakaran dan Relawan kebakaran Jumlah seluruh kejadian Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Layanan pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran dan kelompok siaga kebakaran
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pem	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	Jumlah Nilai akuntabilitas Kinerja SKPD	Satpol PP dan Damkar	Pengukuran nilai akuntabilitas kinerja oleh Inpektorat Kab.Solok.
		Indeks Kepuasan Aparatur	Nilai	Nilai Indeks kepuasan Aparatur	Satpol PP dan Damkar	Pengukuran Nilai kepuasan aparatur oleh pihak internal Satpol PP dan Damkar

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan pencapaian masing –masing indikator dalam rencana kerja tahunan dengan dana yang berasal dari APBD, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok salah satu organisasi Perangkat Daerah yang mendukung Urusan Wajib Pelayanan Dasar dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan Program dan kegiatan sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan dan Sub kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Dedeksi Dini, Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
2. Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam ran gka Ketentraman dan Ketertiban umum.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azazi manusia
4. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertikban umum
5. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan:

1. Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan.
 - Pencegahan kebakaran dalam Kabupaten/Kota
 - Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam kabupaten/kota
 - Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
 - Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
 - Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
 - Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
2. Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran

- Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
 - Penilaian sarana dan prasarana poteksi kebakaran
3. Investigasi kejadian kebakaran
- Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- Sub Kegiatan :
- Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
 - Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.
5. Penyelenggaraan operasi pencarian pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
- Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang meninpa, membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia
 - Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap mkondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap koindisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
 - Pembinaan aparaturn pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.

Berikut tabel Analisis pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP dan Damkar kabupaten Solok tahun 2021 pada Tabel T.C 30 sbb :

Tabel T.C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 Satpol PP dan Damkar Kab.Solok

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahu n 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n- 2)	(thn n- 1)	(thn n)	(thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Penurunan Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelanggaran Perda dan Perkada di tindak Lanjuti
2	Rasio Satlinmas per Nagari		740 org	651	656	701	701	651	651	656	701	701	Penambahan Anggota Linmas Nagari
3	Response Time Rate (tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen Kebakaran (WMK)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dengan adanya KSK (kelompok Siaga Kebakaran) sebagai pelaksana penanggulangan kebakaran sebelum Armada Pemadam sampai ke Lokasi kejadian kebakaran

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Satuan Satpol PP dan Damkar yang didasarkan Tugas dan Fungsi, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu merumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Satpol PP dan Damkar antara lain :

1. Rendahnya rasio personil Satpol PP yang berkualitas PPNS dibandingkan jumlah penduduk.
2. Rendahnya cakupan Patroli Petugas Satpol PP sehingga meningkatnya Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
3. Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada.
4. Kurangnya Sosialisasi tentang layanan Informasi Kebakaran.
5. Kurangnya Sosialisasi tentang layanan Informasi Kebakaran.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisa kebutuhan telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Berikut tabel T.C 3.1 Riview terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Solok

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP dan Damkar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Kab.Solok	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	100%	10.014.974.045	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Kab.Solok	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	100%	10.014.974.045	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satpol PP dan Damkar	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.000.818.419	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP dan Damkar	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.000.818.419	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	42.175.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	42.175.000	
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	7.175.000	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	7.175.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat Realisasi kinerja SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat Realisasi kinerja SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	35.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya dokumen administrasi keuangan	12 Dokumen	4.343.927.799	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya dokumen administrasi keuangan kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	4.343.927.799	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP dan Damkar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	52 orang	4.248.777.299	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP dan Damkar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	52 orang	4.248.777.299	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ferivikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	72.440.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ferivikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	72.440.000	

	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	13.615.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	13.615.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	14 Dokumen	9.095.500	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	14 Dokumen	9.095.500	
3	Administrasi Barang Milik Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya dokumen administrasi Barang Milik Daerah	12 Dokumen	6.300.000	Administrasi Barang Milik Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya dokumen administrasi Barang Milik Daerah	12 Dokumen	6.300.000	
	Penata usahaan Barang Milik Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Dokumen	6.300.000	Penata usahaan Barang Milik Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Dokumen	6.300.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	67.499.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	67.499.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	52 Stel	26.775.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	52 Stel	26.775.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP dan Damkar	jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	6 orang	40.724.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP dan Damkar	jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	6 orang	40.724.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya komponen administrasi umum perangkat daerah	4 komponen	179.228.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	tersedianya komponen administrasi umum perangkat daerah	4 komponen	179.228.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	4 paket	1.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	4 paket	1.200.000	
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah paket bahan logistik kantor	37 paket	37.369.500	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah paket bahan logistik kantor	37 paket	37.369.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 paket	17.643.000	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 paket	17.643.000	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	123.016.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	123.016.000	

6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	30.000.000	Pengadaan barang daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	30.000.000	
	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor yang disediakan	3 unit komuter	30.000.000	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor yang disediakan	3 unit komuter	30.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 laporan	34.593.120	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 laporan	34.593.120	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.560.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.560.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	28.433.120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	28.433.120	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	2.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	2.800.000	
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	1.800.000	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	1.800.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 laporan	297.095.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 laporan	297.095.000	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan	16 unit	283.900.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan	16 unit	283.900.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 unit komputer, 6 unit laptop	8.195.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 unit komputer, 6 unit laptop	8.195.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit ruang area bebas Rokok	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit ruang area bebas Rokok	5.000.000	
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Solok	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	2.579.557.826	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Solok	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	2.579.557.826	

9	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Solok	Tersedianya Dokumen Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	2.491.300.819	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Solok	Tersedianya Dokumen Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	2.491.300.819
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Solok	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawasan.	12 kasus	1.818.168.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Solok	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawasan.	12 kasus	1.818.168.000
	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	Kab.Solok	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	12 kasus	17.700.000	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	Kab.Solok	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	12 kasus	17.700.000
	koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	Kab.Solok	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	4 Dokumen	73.843.500	koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	Kab.Solok	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	4 Dokumen	73.843.500
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil yang memuat Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.	1 dokumen	97.781.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil yang memuat Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.	1 dokumen	97.781.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab.Solok	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2.900 orang	389.996.569	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab.Solok	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2.900 orang	389.996.569
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan	1 dokumen	38.990.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban	1 dokumen	38.990.000

			ketentraman dan ketertiban umum					umum			
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah sarana dan prasarana trantibum	1 unit mobil Patroli	25.783.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah sarana dan prasarana trantibum	1 unit mobil Patroli	25.783.000	
10	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota	Kab.Solok	Tersedianya dokumen Pelaksanaan penegakan peraturan daerah	3 Dokumen	62.732.007	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Tersedianya dokumen Pelaksanaan penegakan peraturan daerah	3 Dokumen	62.732.007	
	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi perda	1 laporan	33.200.000	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi perda	1 laporan	33.200.000	
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	Kab.Solok	Jumlah Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	12 laporan	16.515.000	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	Kab.Solok	Jumlah Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	12 laporan	16.515.000	
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	12 laporan	13.017.007	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	12 laporan	13.017.007	
11	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten kota	Kab.Solok	Tersedianya laporan Pembinaan PPNS	1 laporan	25.525.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten kota	Kab.Solok	Tersedianya laporan Pembinaan PPNS	1 laporan	25.525.000	
	Pengembangan kapasitas dan karir PPNS	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta penegakan Perda	1 laporan	25.525.000	Pengembangan kapasitas dan karir PPNS	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta penegakan Perda	1 laporan	25.525.000	
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab.Solok	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2.434.597.800	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab.Solok	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2.434.597.800	

12	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Solok	Tersedianya dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	2.257.265.300	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Solok	Tersedianya dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	2.257.265.300	
	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab.Solok	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan pencegahan kebakaran	1 Dokumen	12.315.500	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab.Solok	Jumlah dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran	1 Dokumen	12.315.500	
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket Pemadam Kebakaran	12 laporan	2.000.848.000	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket	12 laporan	2.000.848.000	
	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen Petugas Piket hasil pelaksanaan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	12 Dokumen	15.162.500	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen Petugas Piket hasil pelaksanaan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	12 Dokumen	15.162.500	
	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan (B3) dalam daerah kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.400.000	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan oleh (B3) dalam daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	10.400.000	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil Standarisasi Sarana prasarana Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung diri secara berkala (setiap tahun)	1 Dokumen	6.750.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil Standarisasi Sarana prasarana Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung diri secara berkala (setiap tahun)	1 Dokumen	6.750.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Kab.Solok	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	3 paket	128.584.000	Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Kab.Solok	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	3 paket	128.584.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2 orang	51.305.300	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2 orang	51.305.300	

	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Kab.Solok	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	2 dokumen	31.900.000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Kab.Solok	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	2 dokumen	31.900.000	
13	Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	Kab.Solok	Tersedianya dokumen data bangunan/gedung lingkungan yang memiliki sistim sarana prasarana proteksi kebakaran dan memenuhi kelaikan standar proteksi kebakaran	2 dokumen	21.150.000	Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	Kab.Solok	Tersedianya dokumen data bangunan/gedung lingkungan yang memiliki sistim sarana prasarana proteksi kebakaran dan memenuhi kelaikan standar proteksi kebakaran	2 dokumen	21.150.000	
	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Kab.Solok	Jumlah Dokumen data bangunan/Gedung lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistim proteksi kebakaran	1 Dokumen	10.675.000	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Kab.Solok	Jumlah Dokumen data bangunan/Gedung lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistim proteksi kebakaran	1 Dokumen	10.675.000	
	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung lingkungan yang memenuhi kelaikan Standar sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	10.475.000	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung lingkungan yang memenuhi kelaikan Standar sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	10.475.000	
14	Investigasi kejadian kebakaran	Kab.Solok	Tersedianya dokumen penyebab terjadinya kebakaran	1 Dokumen	37.050.000	Unvestigasi kejadian kebakaran	Kab.Solok	Tersedianya dokumen penyebab terjadinya kebakaran	1 Dokumen	18.525.000	
	Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	1 Dokumen	37.050.000	Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	1 Dokumen	18.525.000	
15	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Kab.Solok	Tersedianya dokumen Relawan Pemadam kebakaran	2 dokumen	51.675.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Kab.Solok	Tersedianya dokumen relawan pemadam kebakaran	2 dokumen	51.675.000	

	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Kab.Solok	Jumlah warga masyarakat yang yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	150 orang	30.665.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Kab.Solok	Jumlah warga masyarakat yang yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	150 orang	30.665.000	
	Pembentukan dan Pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah Nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup sistim ketahanan kebakaran lingkungan /SKKL setiap tahunnya	15 nagari	21.010.000	Pembentukan dan Pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah Nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup sistim ketahanan kebakaran lingkungan /SKKL setiap tahunnya	15 nagari	21.010.000	
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 laporan	5.360.000	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 laporan	5.360.000	
	Standarinsasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi.	Kab.Solok	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi.yang sesuai standar secara berkala secara syah dn	1 Dokumen	19.880.000	Standarinsasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi.	Kab.Solok	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi.yang sesuai standar secara berkala secara syah dn	1 Dokumen	19.880.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Kab.Solok	Jumlah Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	11 Paket	51.442.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Kab.Solok	Jumlah Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	11 Paket	51.442.500	
	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi.	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 laporan	9.300.000	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi.	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 laporan	9.300.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok di buat berdasarkan penelaahan beberapa kajian sebagai berikut :

- Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
- Rencana pembangunan jangka Panjang Nasional
- Rencana pembangunan menengah nasional
- Rencana pencapaian standar pelayanan minimal
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok
- Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Solok
- Potensi dan permasalahan ketentraman. Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
- Monotoring dan evaluasi terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlidungan masyarakat
- Musyawarah pembangunan tingkat di Tingkat kecamatan dan
- Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok.

Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku kepentingan Tahun anggaran 2023 terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak ada informasi dan usulan pada pelaksanaan Musrembang di Tingkat Kecamatan dan Musrembang di Tingkat Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Telaah kebijakan Nasional untuk yang dilaksanakan di daerah mengaju pada arah kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang tertuang dalam rancangan awal RKPD yang memuat aspek-aspek peningkatan kualitas hidup sumberdaya manusia yang tercermin dalam kualitas peningkatan produktifitas tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Telaah terhadap kebijakan nasional juga menyangkut telaah kebijakan dan proiritas Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok yang teritegrasi dalam sistim petencanaan pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Solok dan yang menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Damkar sesuai dengan tugas dan fungsi dalam tujuan **meningkatkan kualitas pelayanan publik**.

B. sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

C. Indikator kinerja tujuan dan sasaran

1. Persentase Penegakan Perda
2. Persentase cakupan Petugas Perlindungan masyarakat (linmas)
3. Persentase cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

4. Persentase Tingkat waktu tanggap (Response time rate) dalam daerah layanan kebakaran
5. Indeks kepuasan aparaturnya.

3.3 Program dan kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, program dan kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya.
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan
 - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan dan Sub kegiatan :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deduksi Dini, Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
2. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa
3. Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azazi manusia

5. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertikban umum
 6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 7. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 8. Penyediaan layanan dalam rangka Dampak penergakan Peraturan Daerah dan Perkada.
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Penegagan peraturan Daerah dan peraturan Bupati /Walikota
 2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3. Kegiatan Pembinaan Penyidikan pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas dan karir PPNS

III. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Kegiatan Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Standarisasi sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
5. Pengadaan Saran dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
6. Pembinaan aparatur pemadam Kebakaran
7. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran.

2. Kegiatan Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran

Sub kegiatan :

1. Pendataan sarana dan prasarana Proteksi kebakaran
2. Penilaian sarana dan prasarana Proteksi kebakaran

3 .Kegiatan Investigasi kejadian kebakaran

Sub Kegiatan :

1. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi masyarakat
2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

5 . Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia
2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi

3. Pengadaan sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi
4. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi.

Berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP dan Damkar Tahun 2023 dan Maju mundur tahun 2024 pada Tabel T.C 33 sbb :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Solok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik			10.014.974.045				13.582.572.795
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.000.818.419				5.242.477.919
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	42.175.000	APBD		100%	42.175.000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		4 Dokumen	7.175.000	APBD		4 Dokumen	7.175.000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dolkumen laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD		4 Laporan	35.000.000	APBD		4 Dokumen	35.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi keuangan		100%	4.343.927.799	APBD		100%	4.344.927.799
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		52 orang/bln	4.248.777.299	APBD		52 orang	4.248.777.299
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12 Dokumen	72.440.000	APBD		12 Dokumen	72.440.000

1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 laporan	13.615.000	APBD		1 Dokumen	14.615.000
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD		14 laporan	9.095.500	APBD		14 Dokumen	9.095.500
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah		100%	6.300.000	APBD		100%	7.000.000
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	6.300.000	APBD		2 Laporan	7.000.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian perangkat Daerah yang terlaksana		100%	67.499.000	APBD		100%	282.844.000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		52 Paket	26.775.000	APBD		52 Stel	39.000.000
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		2 orang	40.724.000	APBD		6 orang	243.844.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100%	179.228.500	APBD		100%	189.643.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan kantor yang disediakan		4 paket	1.200.000	APBD		4 paket	1.500.000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		37 paket	37.369.500	APBD		37 paket	42.500.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan		2 paket	17.643.000	APBD		2 paket	20.643.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 laporan	123.016.000	APBD		12 laporan	125.000.000

1.05.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		100%	30.000.000	APBD		100%	30.000.000
1.05.01.2.07.11	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor yang disediakan		3 unit	30.000.000	APBD		3 unit komuter	30.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa kebutuhan urusan administrasi kantor		100%	34.593.120	APBD		100%	35.793.120
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1 laporan	1.560.000	APBD		1 laporan	1.560.000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 laporan	28.433.120	APBD		1 laporan	28.433.120
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	2.800.000	APBD		1 laporan	4.000.000
1.05.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	1.800.000	APBD		1 laporan	1.800.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang Milik Daerah		100%	297.095.000	APBD		100%	317.095.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinanya		16 unit	283.900.000	APBD		17 unit	283.900.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		9 unit	8.195.000	APBD		11 unit	8.195.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1 unit	5.000.000	APBD		1 unit	25.000.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penertiban pelanggaran trantibum yang ditangani		100%	2.579.557.826	APBD		100%	3.636.484.576
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penertiban Pelanggaran GTrantibum		100%	1.818.168.000	APBD		100%	3.475.779.569

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan.		12 kasus	2.491.300.819	APBD			2.400.000.000
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan.		12 kasus	17.700.000	APBD			20.000.000
1.05.02.2.01.03	koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.		4 Dokumen	73.843.500	APBD			75.000.000
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil yang memuat Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.		1 dokumen	97.781.000	APBD			105.000.000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		2.900 orang	389.996.569	APBD			389.996.569
1.05.02.2.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan		1 dokumen	38.990.000	APBD			45.000.000
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia		1 unit	25.783.000	APBD		1 unit	410.783.000
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimuthirkan		4 Dokumen	9.037.500	APBD		4 Dokumen	10.000.000

1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang tertangani		1 Laporan	20.001.250	APBD		1 Laporan	20.000.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	Persentase pelanggaran Perda dan Perbup yang tertangani		100%	62.732.007	APBD		100%	127.505007
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha.		1 laporan	33.200.000	APBD			38.990.000
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota		12 laporan	16.515.000	APBD			25.783.000
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP.		12 laporan	13.017.007	APBD			62.732.007
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten kota	Persentase Pembinaan Personil PPNS		100%	25.525.000	APBD		100%	33.200.000
1.05.02.2.03.01	Pengembangan kapasitas dan karir PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada.		1 laporan	25.525.000	APBD			33.200.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	2.434.597.800	APBD			4.702.910.300
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan dan evakuasi kebakaran		100%	2.257.265.300	APBD		100%	4.408.681.300
1.05.04.2.01.01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen NSPM penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya		1 dukumem	12.315.500	APBD			12.315.500

1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas Piket dan Pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten /Kota		40 laporan	2.000.848.000	APBD			2.000.848.000
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyalanatan evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.		1 Dokumen	15.162.500	APBD			15.162.500
1.05.04.2.01.04	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota		1 dokumen	10.400.000	APBD			10.400.000
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana prasarana Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung diri secara berkala (setiap tahun) sah dan legal		1 dokumen	6.750.000	APBD			6.750.000
1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait.		6 unit	128.584.000	APBD			2.200.000.000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		2 orang	51.305.300	APBD			51.305.300
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan sistim komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistim komunikasi dan informasi kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa diperbaharui atau dimutakhirkan secara Berkala (setiap tahun) berkelanjutan dan Real Time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya.		1 Nagari					50.000.000
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan		2 dokumen	31.900.000	APBD			31.900.000

1.05.04.2.01.10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Jumlah kulurga yang mengikuti pelatihan Kuluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		20 Keluarga					30.000.000
1.05.02.2.02	Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	Persentase Bangunan/Gedung / lingkungan yang memiliki sarpras Proteksi dan memenuhi stansar Proteksi kebakaran		100%	21.150.000	APBD		100%	21.150.000
1.05.02.2.02.01	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung yang memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran		1 Dokuemn	10.675.000	APBD			10.675.000
1.05.02.2.02.02	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung lingkungan yang memenuhi kelaikan Standar sarana prasarana proteksi kebakaran		1 Dokumen	10.475.000	APBD			10.475.000
1.05.02.2.03	Investigasi kejadian kebakaran	Persentase penyebab terjadinya kebakaran		100%	18.525.000	APBD		100%	37.050.000
1.05.02.2.03.01	Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian		12 Dokumen	18.525.000	APBD			37.050.000
1.05.02.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Nagari yang mengikuti sosialisasi dan edukasi pencegahan, peanggulangan kebakaran		13 Nagari	51.675.000	APBD		26 Nagari	62.175.000
1.05.02.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya		250 orang	30.665.000	APBD			30.665.000
1.05.02.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup sistim ketahanan kebakaran lingkungan /SKKL setiap tahunnya		10 Nagari	21.010.000	APBD			21.010.000
1.05.02.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/kelurahan ysang telah tersedia Dukungan Sarpras Damkar		1 dokumen					10.500.000

1.05.02.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kondisi membahayakan manusia		100%	85.982.500	APBD		100%	86.902.000
1.05.02.2.05.01	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia		12 laporan	19.880.000	APBD			20.800.000
1.05.02.2.05.02	Standarinsasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi.	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi.yang sesuai standar		1 Dokumen	5.360.000	APBD			5.360.000
1.05.02.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sesuai Standar Teknis		8 unit	51.442.000	APBD			51.442.000
1.05.02.2.05.04	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi.	Jumlah laporan hasil Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal		1 laporan	9.300.000	APBD			9.300.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2023

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dilaksanakan melalui proses perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja melalui kebijakan-kebijakan dan mengacu pada visi dan misi yang diemban oleh Satpol PP dan Damkar yang tertuang dalam Renstra. Adapun rencana kerja Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, target capaian dan pendanaan /pagu indikatif tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Rp 607.540.640
2	Persentase Penegakan Perda	100%	Rp 2.091.780.237
3	Persentase Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	89,19	Rp 487.777.569
4	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ kota	55,55%	Rp 2.000.848.000
5	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) xaerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%	Rp 433.749.800
6	Nilai Akuntabilitas kinerja	79 (BB)	Rp 49.350.000
7	Indeks Kepuasan Aparatur	2,80	Rp 4.343.927.799
	Jumlah		Rp 10.014.974.045

BAB V

PENUTUP

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2023. disusun berdasarkan pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan hasil pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2021, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kabupaten Solok yaitu *"Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat"* dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok dengan lebih efektif dan efisien.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tahun 2023.

Arosuka, Februari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SOLOK



ELAFKI. S.Pd. MM

NIP. 196816021990091002

RENCANA KERJA TAHUNAN
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok
TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	3,51
		Persentase Penegakan PERDA	100
		Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat(Linmas)	89,19
2	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota	55,55
		Persentase Tingkat waktu tanggap (<i>Response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(BB) 79
		Indeks Kepuasan Aparatur	2,80

Arosuka, Februari 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA KABUPATEN SOLOK



ELAFKI. S.Pd. MM

NIP. 196816021990091002